

**Keberlakuan Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Terkait Desa Pasca
Berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa**

Oleh:
Rusdianto Sesung

Surabaya, 22 Juni 2026

MATERI MUATAN PP 16/2026

BAB	PASAL	BAGIAN	PARAGRAF
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1	-	-
BAB II PENATAAN DESA	Pasal 2 - Pasal 30	-	-
BAB III KEWENANGAN DESA	Pasal 31 - Pasal 37	-	-

MATERI MUATAN PP 16/2026

BAB	PASAL	BAGIAN	PARAGRAF
BAB IV PEMERINTAHAN DESA	Pasal 38 - Pasal 93	1. Bagian Kesatu Kepala Desa	1. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa 2. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa 3. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Satu Calon Pada Pemilihan Kepala Desa 4. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Satu Calon Pada Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa 5. Masa Jabatan Kepala Desa 6. Laporan Kepala Desa

MATERI MUATAN PP 16/2026

BAB	PASAL	BAGIAN	PARAGRAF
BAB IV PEMERINTAHAN DESA	Pasal 38 – Pasal 93		7. Pemberhentian Kepala Desa
		2. Bagian Kedua Perangkat Desa	-
		3. Bagian Ketiga Pakaian Dinas dan Atribut	-
		4. Bagian Keempat BPD	-
		5. Bagian Kelima Musyawarah Desa	-
		6. Bagian Keenam Penghasilan Tetap Pemerintah Desa	-

MATERI MUATAN PP 16/2026

BAB	PASAL	BAGIAN	PARAGRAF
BAB V PENATALAKSANAAN PEMERINTAH DESA	Pasal 94 - Pasal 100	1. Bagian Kesatu Tujuan dan Ruang Lingkup Penatalaksanaan Pemerintah Desa 2. Bagian Kedua Penyusunan Pedoman dan Standar Penatalaksanaan Pemerintah Desa 3. Bagian Ketiga Penyusunan Strategi Peningkatan Kompetensi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa 4. Bagian Keempat Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa	-

MATERI MUATAN PP 16/2026

BAB	PASAL	BAGIAN	PARAGRAF
BAB VI TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA	Pasal 101 - Pasal 107	1. Bagian Kesatu Peraturan Desa 2. Bagian Kedua Peraturan Kepala Desa 3. Bagian Ketiga Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4. Bagian Keempat Peraturan Bersama Kepala Desa	-

MATERI MUATAN PP 16/2026

BAB	PASAL	BAGIAN	PARAGRAF
BAB VII KEUANGAN DAN ASET DESA	Pasal 108 - Pasal 135	1. Bagian Kesatu Keuangan Desa	1. Umum 2. Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 4. Penyaluran 5. Belanja dan Pembiayaan Desa 6. APB Desa 7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
		2. Bagian Kedua Aset Desa	-

MATERI MUATAN PP 16/2026

BAB	PASAL	BAGIAN	PARAGRAF
	Pasal 142 – Pasal 164	3. Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa	1. Pemberdayaan Masyarakat 2. Pendampingan Masyarakat Desa 3. Sistem Informasi Desa
BAB X KERJA SAMA DESA	Pasal 165 – Pasal 168	-	-
BAB XI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA	Pasal 169 – Pasal 175	1. Bagian Kesatu LKD 2. Bagian Kedua Pembina dan Kepengurusan LKD 3. Bagian Ketiga LAD 4. Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan LKD dan LAD	-
BAB XII KETENTUAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pasal 176 – Pasal 179	-	-

MATERI MUATAN PP 16/2026

BAB	PASAL	BAGIAN	PARAGRAF
BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN	Pasal 180	-	-
BAB XIV SARANA DAN PRASARANA DESA	Pasal 181 – Pasal 182	-	-
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 183 – Pasal 185	-	-
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN	Pasal 186	-	-
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP	Pasal 187 – Pasal 188	-	-

PP YANG DICABUT OLEH PP 16/2026

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(*vide* Pasal 187 PP 16/2026)

**KEBERLAKUAN
PER-UU-AN DI
BAWAH PP
PASCA
BERLAKUNYA
PP NO. 16
TAHUN 2026**

- a) Teori *daz doppelte rechtstanlitz*;
- b) Meskipun PP 16/2026 mencabut PP 43/2014 yang menjadi sumber pembentukan Perda-Perda tentang Desa, namun UU 6/2014 masih berlaku sehingga Perda-Perda tentang Desa masih memiliki validitas yuridis (sumber ke atas);
- c) Untuk validitas materi muatan Perda-Perda tentang Desa, perlu penelaahan/kajian lebih lanjut mengenai materi muatan PP 16/2026, apabila terdapat materi muatan Perda-Perda tersebut bertentangan dengan materi muatan dalam PP 16/2026, maka Perda-Perda tersebut perlu diubah.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 183

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri sipil dapat memilih untuk tetap sebagai Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya Perangkat Desa yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

Pasal 184

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 185

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kerja sama antardesa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 186

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk pertama kali dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

PERDA GRESIK TERKAIT DESA (yang masih Berlaku)

No.	Perda
1.	Perda Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.	Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Desa Cermenlerek
3.	Perda Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembangunan Desa
4.	Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
5.	Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa
6.	Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

PERDA GRESIK TERKAIT DESA

No.	Perda
7.	Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
8.	Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
9.	Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

PERDA GRESIK TERKAIT DESA

No.	Perda
10.	Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11.	Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
12.	Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13.	Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa
14.	Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri
15.	Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata
16.	Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan
17.	Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Desa



TERIMAKASIH